

FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEMENANGAN TALIBAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021

Fitry Wahyuni

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

fitrywahyuni66@gmail.com

Abstrak

Mundurinya pasukan Amerika Serikat dan NATO dari wilayah Afghanistan menjadi momentum bagi Taliban untuk mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Taliban saat ini kembali menjadi penguasa di Afghanistan setelah 20 tahun digulingkan dari kursi pemerintahan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Taliban kembali berkuasa pada pertengahan Agustus 2021. Taliban berhasil menguasai Kabul hanya dalam dua minggu setelah berhasil menguasai sebagian besar dari 34 provinsi di Afghanistan. Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban itu tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari Tentara Nasional Afghanistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung kemenangan Taliban di Afghanistan tahun 2021. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel berita, dan dokumen lainnya yang relevan dan dapat dijadikan landasan untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai objek penelitian yang diangkat. Penelitian ini menemukan bahwa setelah 20 tahun perang, situasi di Afghanistan tetap kompleks dan sulit untuk diatasi. Pemerintah Afghanistan yang lemah, dukungan terbatas dari masyarakat, dan faktor-faktor lainnya juga berkontribusi pada keberhasilan Taliban dalam merebut kembali kekuasaan di negara tersebut.

Kata Kunci: Afghanistan, Kemenangan Taliban, Politik.

Abstract

The withdrawal of US and NATO troops from Afghanistan provided the momentum for the Taliban to take over power in Afghanistan. The Taliban are now back in power in Afghanistan after 20 years of being ousted from the seat of government by the United States and its allies. The Taliban returned to power in mid-August 2021. The Taliban managed to take control of Kabul in just two weeks after controlling most of Afghanistan's 34 provinces. The takeover of power by the Taliban did not encounter significant resistance from the Afghan National Army. This study aims to identify the factors that support the victory of the Taliban in Afghanistan in 2021. The method used is qualitative, using a literature search method from various sources such as books, journals, news articles, and other documents that are relevant and can be used as a basis for providing explanations. in detail about the research object raised. This research finds that after 20 years of war, the situation in Afghanistan remains complex and difficult to resolve. The weak Afghan government, limited support from the public, and other factors also contributed to the success of the Taliban in regaining power in the country.

Keywords: *Afghanistan, Politics, the Win of Taliban.*

Pendahuluan

Kembali berkuasanya kelompok Taliban di Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021 menjadi berita yang mengejutkan bagi masyarakat internasional. Kelompok yang berhaluan Islam konservatif itu berhasil menguasai wilayah ibukota Kabul dan menduduki kantor kepresidenan. Peristiwa ini terjadi setelah presiden Ashraf Ghani memutuskan untuk melarikan diri dari negara itu (Sorongan, 2021). Pengambilalihan Kabul awalnya dimulai dengan kampanye militer Taliban yang berlangsung selama beberapa bulan untuk menguasai beberapa provinsi. Sebagian besar provinsi berhasil dikuasai tanpa perlawanan (VOA, 2022).

Taliban sendiri telah melalui perjalanan yang panjang untuk merebut kembali Afghanistan. Sebelumnya, Taliban pernah berkuasa pada tahun

1996 hingga 2001. Di penghujung tahun 1996, kekuatan Taliban semakin besar setelah memperoleh dukungan penuh dari masyarakat Afghanistan beretnis Pashtun dan kelompok-kelompok Islam Konservatif yang berasal dari luar Afghanistan. Besarnya dukungan tersebut membawa Taliban menjadi penguasa sah pada tahun 1996. Pemerintahan yang dibentuk Taliban kala itu dikenal dengan nama Imarah Islam Afghanistan (Anugerah & Purba, 2021). Pada saat itu, Taliban mengadopsi hukum Islam dengan pemahaman ultra-konservatif dalam pembuatan perundang-undangan dan menjalankan sistem pemerintahan. Sejumlah kebijakan mereka mengundang kontroversi dan membuat mereka tidak disukai oleh masyarakat Afghanistan maupun komunitas Internasional (Aswar, 2021).

Kekuasaan Taliban pada tahun 1996 hingga 2001 hanya diakui oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui rezim Taliban karena dianggap banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum (Anugerah & Purba, 2021). Pada saat itu, Taliban menerapkan hukum syariah yang sangat ketat, mereka melarang mendengarkan musik, menonton televisi, menggunakan internet, fotografi, dan berbagai hiburan lainnya (Bahar, 2020). Selain itu, perempuan secara resmi dilarang mengenyam pendidikan dan menghadapi berbagai diskriminasi. Perempuan diharuskan mengenakan pakaian tradisional muslim Pashtun yang menutupi seluruh tubuh. Sementara laki-laki harus menggunakan sorban dan memanjangkan janggut (Drissel, 2014). Pada tahun 2001, Taliban digulingkan oleh koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Mereka dituduh melindungi Osama bin Laden dan gerakan al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di World Trade Centre, New York, September 2001 (BBC, 2021).

Setelah 20 Tahun berperang melawan invasi Amerika Serikat dan North Atlantic Treaty Organization (NATO), Taliban berhasil menduduki kembali kursi kekuasaan di Afghanistan. Selama 20 tahun terakhir, Amerika

Serikat telah menghabiskan anggaran lebih dari US\$ 2 triliun di Afghanistan dan telah kehilangan ribuan tentara (CNBC Indonesia, 2021). Namun upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO untuk membawa keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Afghanistan nampak sia-sia, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Soviet sebelumnya (Beale, 2021).

Kajian terkait kemenangan Taliban di Afghanistan tahun 2021 sudah banyak dikaji. Beberapa diantaranya membahas faktor-faktor yang berkontribusi pada pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan seperti yang ditulis oleh Florian Weigand (2022). Artikel ini menyoroti kegagalan komunitas internasional dan pemerintah Afghanistan dalam membangun negara yang sah dan inklusif (Weigand & Cox, 2022). Kajian lain dilakukan oleh Charles J. Sullivan (2021) yang membahas situasi Afghanistan setelah kembali berkuasanya Taliban. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah Afghanistan, kehadiran pasukan asing, dan dampak COVID-19. Penelitian ini juga mengkaji kemungkinan pemerintahan sementara dan implikasi dari kembalinya kekuasaan Taliban di negara tersebut (Sullivan, 2021). Pendekatan lain dilakukan oleh Farooq Yousaf dan Moheb Jabarkhail (2021) yang membahas tentang situasi di Afghanistan di bawah rezim Taliban dan masa depan negara tersebut. Ini mencakup perkembangan terakhir di Afghanistan, kampanye public relations Taliban, dan tantangan yang dihadapi oleh gender dan hak media di bawah pemerintahan Taliban. Salah satu poin yang disoroti dalam artikel tersebut yaitu penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan yang menandai berakhirnya perang selama 20 tahun dan menyebabkan Taliban mengambil alih negara tersebut (Yousaf & Jabarkhail, 2021).

Hasil dan Diskusi

Pengambilalihan Kekuasaan di Afghanistan Tahun 2021

Selama penjajahan Uni Soviet di Afghanistan, sebagian besar rakyat Afghanistan mengungsi di bagian Selatan dan Timur negeri itu. Seiring berjalannya waktu, muncul lembaga-lembaga pendidikan di tempat pengungsian yang dikelola oleh partai Islam Pakistan yang bernama Jamiat Ulama Islam. Selama masa invasi, madrasah menawarkan kekuatan sosial yang besar dalam membantu pemerintah melawan pendudukan asing. Pada masa ini juga ideologi perlawanan yang disebut sebagai jihad mulai bermunculan (Machmudi et al., 2021).

Peran madrasah di Afghanistan tidak hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam saja, akan tetapi juga sebagai lembaga yang mampu melaksanakan fungsi sosial dan mempersatukan kelompok sosial dari berbagai etnis dan suku di Afghanistan. Terlebih lagi nilai-nilai Islam mampu diartikulasikan oleh madrasah di Afghanistan dalam perjuangan melawan pengaruh ideologi komunisme Uni Soviet di negara tersebut. Madrasah sebagai simbol perjuangan selalu mengambil peran penting dalam memperjuangkan hak rakyat. Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi rakyat Afghanistan. Madrasah juga memiliki peran dalam munculnya gerakan Taliban, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Kandahar hingga perbatasan selatan Afghanistan-Pakistan (Sahrasad et al., 2021).

Istilah “Taliban” berasal dari bahasa Pashtun yang berarti pencari ilmu atau murid yang dikhususkan kepada laki-laki. Dalam hal ini berarti Taliban merujuk pada murid yang belajar di Madrasah, lembaga pendidikan Islam di Afghanistan. Taliban merupakan sebuah kelompok yang bersifat sangat konservatif yang muncul pada dekade 1990-an (Drissel, 2014). Taliban

secara resmi didirikan pada pertengahan tahun 1994 di provinsi selatan Afghanistan, yakni Kandahar. Mereka memperoleh dukungan secara finansial dan militer dari Pakistan dan Arab Saudi. Gerakan ini terdiri dari para pelajar dari etnis Pashtun yang berasal dari berbagai madrasah seperti Zawiyah yang terletak di daerah perbatasan Afghanistan dan Pakistan di Peshawar, Balochistan dan lain sebagainya (Sahrasad et al., 2021).

Taliban muncul ketika Afghanistan sedang mengalami krisis, kekosongan ideologi, dan memulai reformasi. Kelompok ini kemudian melakukan reformasi dengan ideologi berdasarkan syari'at Islam, yaitu jihad (Machmudi et al., 2021). Para pengamat menyebutkan bahwa pandangan Taliban terhadap jihad terinspirasi dari aliran Sunni Deobandi yang berpusat di India yang diajarkan oleh Shah Waliullah (1703-1762) (Ashghor, 2021). Kelompok ini dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar yang merupakan seorang guru dari madrasah Sang-i Hisar di Provinsi Kandahar Utara (Machmudi et al., 2021).

Setelah penarikan Soviet dari Afghanistan di akhir 1980-an, negara kembali tercabik-cabik oleh perang saudara, kali ini pertikaian antara faksi-faksi politik Afghanistan. Perang saudara berkecamuk pada 1995, Taliban menyerang posisi pemerintah dekat Kabul dari markas mereka di Selatan. Penyerangan ini mendapat bantuan rahasia dari operasi intelijen Pakistan (Drissel, 2014). Pada penghujung 1996, kekuatan Taliban semakin besar setelah mendapat dukungan penuh dari masyarakat Afghanistan yang beretnis Pashtun dan kelompok-kelompok Islam konservatif yang berasal dari luar Afghanistan. Besarnya dukungan tersebut membawa Taliban menjadi penguasa sah pada 1996. Pemerintahan yang dibentuk Taliban dikenal dengan nama Imarah Islam Afghanistan (Anugerah & Purba, 2021).

Di bawah kepemimpinan Taliban, Afghanistan tidak pernah menyelenggarakan pemilihan umum karena dianggap tidak sesuai dengan

prinsip syariah. Pemerintahan Taliban pada periode 1996 hingga 2001 hanya diakui oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sebaliknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui rezim Taliban karena dianggap banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum (Anugerah & Purba, 2021). Kala itu Taliban menerapkan hukum syariah yang sangat ketat, mereka melarang mendengarkan musik, menonton televisi, menggunakan internet, fotografi, dan berbagai hiburan lainnya (Bahar, 2020). Tidak hanya itu, perempuan secara resmi dilarang mengenyam pendidikan dan menghadapi berbagai diskriminasi pekerjaan. Perempuan diharuskan mengenakan pakaian tradisional muslim pashtun yang menutupi seluruh tubuh. Sementara laki-laki harus menggunakan sorban dan memanjangkan janggut (Drissel, 2014).

Kemenangan Taliban di Afghanistan Tahun 2021

Afghanistan telah dikenal sebagai “*the graveyard of empires*” selama lebih dari satu abad. Tentara asing yang memasuki pegunungan Afghanistan cenderung menghadapi perlawanan sengit dan sering kali kalah dalam pertempuran melawan pejuang suku. Kekuatan besar seperti Alexander Agung pada tahun 330 SM, Kerajaan Inggris pada tahun 1840-an, hingga Uni Soviet pada tahun 1980-an, telah bertemu lawan mereka di Afghanistan dan kekalahan sebagai hasilnya (Drissel, 2014).

Taliban berhasil merebut ibukota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus 2021. Hal penting yang perlu dicatat adalah Taliban memasuki Kabul tanpa menghadapi perlawanan. Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan dianggap sebagai sebuah tragedi oleh beberapa negara. Pengusahaan Kabul oleh Taliban memicu kepanikan di kota itu. Hal ini dapat disaksikan dari beberapa kanal media yang menampilkan foto yang menggambarkan ratusan warga Afghanistan berbondong-bondong berusaha meninggalkan negeri itu menggunakan pesawat militer Amerika Serikat. Mereka khawatir

kembalinya Taliban di tampuk kekuasaan akan diwarnai kerusuhan yang berkepanjangan (Haryanto, 2021).

Setelah 20 tahun berperang melawan invasi Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), kini muncul pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan sehingga Taliban dapat kembali berkuasa. Selama 20 tahun terakhir, ribuan generasi muda berhasil direkrut oleh Taliban untuk pergerakannya. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri telah menghabiskan anggaran lebih dari US\$ 2 triliun selama 20 tahun di Afganistan dan telah kehilangan ribuan tentara (CNBC Indonesia, 2021). Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk program pelatihan dan memperlengkapi pasukan keamanan Afghanistan. Namun saat ini, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO untuk membawa keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Afghanistan nampak sia-sia, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Soviet sebelumnya (Beale, 2021). Ada beberapa faktor pendukung kemenangan Taliban di Afghanistan diantaranya adalah sebagai berikut.

Perjanjian Damai 29 Februari 2020

Perjanjian kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Taliban menjadi salah satu pintu masuk bagi kemenangan Taliban di Afghanistan. Perjanjian ini resmi ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Sebelum mencapai kesepakatan tersebut, Amerika Serikat dan Taliban telah memulai pembicaraan damai secara tentatif (Detik News, 2021a). Perjanjian ini menandai berakhirnya invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan yang telah berlangsung selama 18 tahun. Pihak Taliban diwakili oleh Mullah Abdul Ghani Baradar selaku kepala juru runding Taliban. Sementara itu, pihak Amerika Serikat diwakili oleh Zalmay Khalilzad yang merupakan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan.

Penandatanganan perjanjian bersejarah tersebut juga turut disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo (Kompas.com, 2020).

Sejak tahun 2018, Pemerintah Donald Trump telah membangun kontak-kontak dengan jaringan Taliban. Negara-negara yang berperan dalam membuka kontak dan memediasi proses pembicaraan damai tersebut diantaranya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pada 26 Januari 2019, tim juru runding Taliban dan Amerika Serikat bertemu kembali di Doha, Qatar. Pertemuan ini bertujuan untuk memfinalisasi poin yang akan dicantumkan dalam draf perjanjian damai untuk mengakhiri perang di Afghanistan (Tempo.co, 2019). Sayangnya, upaya negosiasi di tahun 2019 menemui jalan buntu karena Donald Trump membatalkan pertemuan rahasia dengan pemimpin Taliban dan Presiden Ashraf Ghani di Camp David (CNN Indonesia, 2019a). Pembatalan ini merupakan wujud kekecewaan Amerika Serikat terhadap sikap Taliban yang tetap agresif melakukan penyerangan di tengah proses perundingan damai (CNN Indonesia, 2019b).

Hal yang menarik dari perundingan damai ini adalah Amerika Serikat mau melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Taliban yang dilabelinya sebagai “teroris”. Selain itu, upaya-upaya negosiasi tersebut dilakukan dalam situasi okupasi Amerika Serikat tidak menghasilkan kemajuan yang berarti meskipun telah berlangsung selama dua dekade. Upaya Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Afghanistan secara substansial tidak menghasilkan kesadaran ideologis (demokrasi liberal) yang signifikan dan tidak mengakar. Di sisi lain, Taliban masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di tengah masyarakat.

Perjanjian di Doha kala itu menghasilkan dokumen yang berjudul *“Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the*

Taliban and the United States of America”. Terdapat empat poin perjanjian antara Taliban dan Amerika Serikat yang dimuat dalam dokumen tersebut diantaranya; (1) pihak Taliban harus memastikan bahwa Afghanistan tidak digunakan oleh kelompok atau individu manapun untuk mengancam kepentingan Amerika Serikat dan sekutu, (2) Amerika Serikat dan sekutu akan melakukan penarikan pasukan dari wilayah Afghanistan. Penarikan mundur ini dilakukan secara bertahap selama 14 bulan, (3) Pemerintah Afghanistan dan Taliban akan melakukan perundingan mengenai masa depan Afghanistan, dan (4) Pihak Taliban dan Pemerintah Amerika Serikat akan melakukan gencatan senjata permanen (U.S Embassy in Qatar, 2020).

Setelah mencapai kesepakatan dengan Taliban di Qatar tahun 2020, Washington mulai menarik pasukannya dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban dan komitmen untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan. Meskipun kedua pihak telah terlibat dalam dialog, akan tetapi kekerasan di Afghanistan semakin meningkat (Asmara, 2021). Beberapa pihak merasa ngeri dengan perundingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Taliban. Ketakutan menjadi berlipat ganda setelah Presiden Joe Biden menegaskan bahwa ia akan memenuhi kesepakatan itu dan sebagai imbalannya Taliban berjanji tidak akan menjadikan Afghanistan sebagai wilayah operasi terorisme internasional (Simpson, 2021). Kebijakan Joe Biden untuk menarik seluruh pasukan dari Afghanistan ini selaras dengan kebijakan pendahulunya, Donald Trump, meskipun mereka berasal dari partai politik yang berbeda (Anugerah & Purba, 2021).

Dalam pidatonya pada 31 Agustus 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa “perang di Afghanistan telah berakhir”. Pidato itu disampaikan oleh Biden di hadapan publik sehari setelah pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul, yang menjadi pertanda berakhirnya perang selama 20 tahun. Biden mengatakan bahwa diakhirinya perang di Afghanistan merupakan bentuk pelaksanaan komitmennya terhadap rakyat Amerika. Menurut Biden, setiap harinya Amerika Serikat

telah menghabiskan biaya US\$300 juta di Afghanistan sehingga sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk pergi (DW, 2021). Meskipun menerima banyak kritik atas kebijakan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, namun Biden tetap dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang perang tanpa akhir tersebut. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berkomitmen untuk menarik mundur seluruh pasukan paling lambat 11 September 2021. Biden menegaskan akan membebaskan rakyat Afghanistan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa Amerika Serikat (CNBC Indonesia, 2021).

Rapuhnya Pemerintahan di Afghanistan

Persoalan lain yang berkaitan dengan kemenangan Taliban adalah lemahnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah Afghanistan. Hal ini menyebabkan keinginan rakyat Afghanistan untuk membela negara di bawah kepemimpinan rezim tidak kuat. Situasi ini menunjukkan bagaimana rezim yang selama ini berkuasa di Afghanistan sangat rapuh. Berkaitan dengan hal tersebut, letak permasalahannya dapat dilihat dari maraknya korupsi, kehidupan ekonomi yang lemah, dan kegagalan demokratisasi dalam menjawab persoalan politik Afghanistan yang kompleks.

Bukanlah hal yang mudah bagi Amerika Serikat dan dunia internasional untuk menstabilkan perekonomian dan membangun negara demokrasi setelah konflik berkepanjangan di Afghanistan. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Pertahanan AS, biaya perang di Afghanistan mencapai US\$815,7 miliar selama dua puluh tahun. Dana tersebut meliputi biaya operasi militer mulai dari makanan, bahan bakar, hingga hingga operasional kendaraan lapis baja Humvee, senjata dan amunisi, tank, hingga kapal induk dan serangan udara (CNBC Indonesia, 2021).

Meskipun pada tingkatan tertentu Amerika Serikat dan sekutu berhasil mengangkat taraf hidup rakyat Afghanistan, membangun infrastruktur, memajukan dunia pendidikan, dan membentuk media independen, akan tetapi pencapaian tersebut tidak disertai dengan perbaikan ekonomi domestik (Machmudi et al., 2021). Menurut laporan *World Bank*, selama ini ekonomi Afghanistan sangat bergantung pada bantuan negara donor. Dana bantuan sebesar US\$ 12,9 miliar telah dihimpun oleh *Afghanistan Reconstruction Trust Fund* yang dikelola oleh *World Bank*. Di sisi pemerintahan, *World Bank* mencatat hibah mendanai 75% belanja negara di Afghanistan. Konflik yang berlarut-larut membuat anggaran pertahanan menjadi sangat tinggi, sekitar 28% dari *Gross Domestic Product* (GDP), yang menyebabkan alokasi dana ke sektor lain menjadi minim (Setiaji, 2021).

Ekonomi Afghanistan tumbuh tinggi karena melimpahnya bantuan dunia kepada negara ini. Pada 2003-2012, GDP Afghanistan rata-rata tumbuh 9,4% per tahun. Namun pada 2015-2020, ekonomi Afghanistan hanya tumbuh rata-rata 2,5% per tahun akibat dari mulai berkurangnya bantuan donor dari sekitar 100% terhadap GDP pada 2009 menjadi 42,9% pada 2020 (Setiaji, 2021). Pada 2020, ketidakstabilan ekonomi mencapai puncaknya, GDP Afghanistan, menyusut hingga minus 2,35 persen turun 6,26% dari 2019 (Statista.com, 2022).

Masalah ekonomi di Afghanistan tidak terlepas dari tingginya tingkat korupsi di negara tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, akan tetapi hal itu akan sulit tercapai karena penyalahgunaan wewenang oleh para elit yang memegang kekuasaan. Situasi ini kemudian memicu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki sistem politik, lembaga ekonomi, dan administrasi yang lemah. Maraknya korupsi di Afghanistan menjadi bukti rendahnya kapasitas administrasi di negara tersebut. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Barat, telah memberikan bantuan dana yang tidak sedikit untuk Afghanistan.

Sayangnya, aliran dana tersebut tidak tersalurkan dengan baik karena adanya korupsi, hal ini menyebabkan proses demokratisasi pun sulit tercapai (Khuru'in, 2017).

Dalam laporan ke Kongres Amerika Serikat pada Oktober 2020, *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction* (SIGAR) memperkirakan antara Mei 2009 hingga 31 Desember 2019 sekitar US\$19 miliar telah lenyap (BBC News, 2021). SIGAR mengecam Washington karena mengucurkan dana miliaran dolar ke Afghanistan dengan pengawasan yang sangat minim sehingga memicu budaya korupsi yang merajalela dan merusak misi Amerika Serikat (Katawazai, 2016). Berdasarkan *Corruption Perception Index* oleh Transparency tahun 2020, Afghanistan berada pada ranking 165 dari 180 negara di dunia, dengan jumlah skor 19/100 (Transparency, 2020).

Korupsi juga telah melemahkan sistem peradilan. Di Afghanistan, peradilan sering kali tunduk pada keinginan pihak yang berkuasa dan yang memiliki koneksi politik. Sementara mereka yang tidak memiliki *privilege* tersebut harus membayar suap dan menderita frustrasi akibat proses peradilan yang panjang. Akibatnya, banyak masyarakat memanfaatkan sistem peradilan informal atau meminta bantuan kepada Taliban. Tindakan ini berimbas pada melemahnya legitimasi pemerintah Afghanistan (Azizi, 2021).

Melemahnya peran negara semakin memudahkan Taliban menguasai sejumlah wilayah penting di utara, terutama Kabul. Di wilayah-wilayah penting tersebut, penegakan hukum dan HAM serta pembangunan ekonomi tidak mengalami pencapaian yang prestisius dan cenderung mengalami distorsi. Pembangunan infrastruktur dan dukungan dana yang diberikan oleh dunia internasional tidak dimanfaatkan secara signifikan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Konflik yang tidak

berkesudahan dan maraknya korupsi berdampak pada hancurnya roda perekonomian di negara tersebut (Machmudi et al., 2021).

Sementara di wilayah yang dikuasai oleh Taliban, kelompok ini mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Menurut James E. Baldwin (2021) & Ashley & Weigand (2019), meskipun Taliban dianggap kelompok ekstremis dan keras, mereka mampu membangun sistem hukum yang adil dalam masyarakat. Banyak orang bahkan memilih untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum mereka di pengadilan Taliban daripada pengadilan negara yang prosesnya lambat dan sulit dijangkau. Taliban dianggap tidak korup, memiliki proses penyelesaian kasus yang cepat, dan hakim yang menjangkau wilayah terpencil (Baldwin, 2021; Jackson & Weigand, 2019).

Kekalahan Militer Pemerintah Afghanistan

Secara hitung-hitungan di atas kertas, *the Afghan National Defense and Security Forces* (ANDSF) memiliki jumlah personel yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih lengkap walaupun tanpa dukungan dari militer Amerika Serikat. Selama kurun waktu 2002-2006, sekitar 300.699 personel telah direkrut oleh koalisi Amerika Serikat dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 307.000, jumlah tersebut termasuk tentara, polisi, dan angkatan udara. Sayangnya, pasukan militer ini hanya diberi peralatan tempur yang canggih tanpa didukung dengan latihan militer yang memadai (Machmudi et al., 2021).

Persoalan lain muncul tahun 2017 dan 2019 dimana terdapat laporan bahwa puluhan ribu tentara “hantu” telah dikeluarkan dari daftar. Ini berarti ada puluhan ribu tentara yang berkurang dan kemungkinan bergabung dengan milisi Taliban. Dalam laporan pada Desember 2020 dari *Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan* disebutkan bahwa hanya ada 298.000 personel yang memenuhi syarat untuk dibayar. Hal ini

menunjukkan ada ribuan tentara yang membelot. Selain itu, maraknya korupsi dan mismanajemen sumber daya menyebabkan kapabilitas pertempuran ANSDF menurun (Machmudi et al., 2021).

Di sisi lain, milisi Taliban bukanlah pasukan yang terlatih dengan konsep militer modern ataupun tentara dengan peralatan tempur yang canggih. Menurut Pusat Pemberantasan Terorisme AS di West Point, total kekuatan inti Taliban diperkirakan berjumlah 60.000 personel. Dengan tambahan pendukung lainnya, jumlah mereka dapat melebihi 200.000 orang (Detik News, 2021a). Umumnya Taliban menghindari pertempuran skala besar selama tentara Afghanistan didukung oleh kekuatan udara Amerika Serikat. Mereka lebih memilih pusat-pusat terpencil dan terisolasi. Taliban menguasai banyak wilayah provinsi dengan bentuk pemerintahan bayangan yang memiliki pengadilan dan sistem pajaknya sendiri (Tempo.co, 2021). Ketika berhasil menguasai Kabul pada 15 Agustus 2021, sebanyak seperempat dari 34 provinsi telah lebih dahulu dikuasai oleh pejuang Taliban. Selain itu, Taliban memiliki satu unit dengan nama Batalion Badri 313 dengan jumlah personel yang dirahasiakan oleh otoritas Taliban (Machmudi et al., 2021).

Untuk membiayai setiap operasi militernya, Taliban membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, meskipun tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Taliban diprediksi menghasilkan US\$300 juta hingga US\$1,6 miliar per tahun. Berdasarkan laporan PBB pada Juni 2021 yang bersumber dari data intelijen negara anggota disebutkan bahwa Taliban memperoleh pasokan dana dari berbagai kegiatan kriminal seperti memproduksi dan memperdagangkan narkoba, pemerasan, dan penculikan. Selain itu, Taliban juga mendapatkan dana dari penguasaan sumber kekayaan alam Afghanistan berupa pertambangan dan donasi dari para pendukungnya. Donasi diperkirakan datang dari negara-negara tetangga yang mengakui Taliban (CNN Indonesia, 2021).

Kekuatan propaganda Media Digital Taliban

Ketika berkuasa pada tahun 1996-2001, Taliban menolak keras penggunaan teknologi informasi dan media modern karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, namun kini Taliban memanfaatkan internet dan media sosial sebagai bagian dari kampanye mereka untuk kembali berkuasa. Taliban telah mengandalkan teknologi atas nama propaganda dan hubungan masyarakat selama lebih dari satu dekade, akan tetapi pemanfaatan media sosial baru berakar beberapa tahun terakhir (Bodetti, 2016).

Selama bertahun-tahun Taliban menggunakan internet dan media sosial dengan mahir. Kampanye media sosial ini menunjukkan bahwa Taliban telah berupaya memperkuat pesan mereka dengan membangun elemen-elemen media sosial. Pada saat yang sama, Taliban juga berusaha untuk melunakkan citra kerasnya, baik di dalam maupun di luar Afghanistan. Media sosial digunakan oleh Taliban untuk mempengaruhi masyarakat dunia dengan konten positif mereka. Kampanye di media sosial ini dilakukan oleh Taliban secara komprehensif. Cara ini dilakukan agar dunia mengetahui aktivitas positif mereka dan mendapatkan legitimasi kekuasaan di Afghanistan.

Pada tahun 2005, Taliban meluncurkan laman resmi dengan nama Al-Emarah, kini kontennya dipublikasi dalam lima bahasa yaitu Inggris, Arab, Pashtun, Dari, dan Urdu. Al-Emarah berarti “emirat” dalam bahasa Arab, mengacu pada negara berdaulat yang pernah mereka kuasai. Menurut saluran Telegram bahasa Inggris mereka, Al-Emarah adalah saluran resmi Imarah Islam Afghanistan yang menyediakan pembaruan berita, artikel, dan pernyataan resmi (Bodetti, 2016). Al-Emarah dapat diakses melalui <https://www.alemarahenglish.af/>. Semua konten yang dipublikasikan pada laman resmi ini berada di bawah pengawasan komisi kebudayaan Emirat

Islam Afghanistan (IEA), yang dipimpin oleh Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban (Detik News, 2021b).

Pada tahun 2011, Taliban mulai menggunakan Twitter untuk menargetkan audiens Barat dan dengan cepat menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan propaganda, menurut penelitian *Terrorism Research Initiative* pada 2014. Di Twitter tidak ada satupun akun Taliban yang terverifikasi, tetapi platform tersebut memungkinkan banyak akun yang tidak terverifikasi untuk mempromosikan kebijakan dan pernyataan Taliban (Dawi, 2022). Pada 2019, Taliban belajar mengambil alih tagar, yang berarti memasukkan tagar populer dengan pesan mereka sendiri (Timberg & Lima, 2021). Akun Twitter utama Taliban, @alemarahweb, diluncurkan pada Desember 2010, dan mulai membagikan tweet berbahasa Inggris setelahnya. Selain @alemarahweb, akun twitter lain yang terkait dengan Taliban diantaranya @alemarahenglish, @Zabehulah_M33, @suhailshaheen1, @QaharBalkhi, @ammarzamarak, @Ahmadmuttaqi01, @HafizZiaAhmad1, @HabibiSamangani, @leaOffice, dan masih banyak lagi.

Umpan Twitter @alemarahweb mulai diposting menggunakan Bahasa Inggris pada Mei 2011. Namun, satu-satunya tweet yang dapat diakses secara bebas adalah tweet yang di posting setelah November 2011. Sebagian besar tweet dari akun Taliban ini biasanya merinci metode penyerangan, jumlah korban jiwa yang ditimbulkan, peralatan yang dihancurkan, dan tempat peristiwa itu terjadi. Dalam pesan Idul Adha tahun 2011, Taliban juga menyebutkan juru bicara resmi, situs web, dan *press release* Imarah Islam. Tweet yang diposting oleh akun Twitter Taliban biasanya menyertakan tautan ke komunikasi resmi, siaran pers, wawancara, puisi, video, dan blog bergaya esai yang diposting di situs web utama Taliban, termasuk Al-Emarah (Drissel, 2014).

Kesimpulan

Pada tahun 2021, Taliban berhasil merebut kembali kekuasaan di Afghanistan. Keberhasilan ini dipicu oleh sejumlah faktor yang mencakup perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban yang ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Perjanjian damai tersebut menandai berakhirnya invasi militer Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 18 tahun di Afghanistan. Dalam perjanjian tersebut, Taliban berjanji untuk tidak membiarkan wilayah Afghanistan digunakan oleh kelompok atau individu manapun untuk mengancam kepentingan Amerika Serikat dan sekutu. Selain itu, Amerika Serikat dan sekutu dijanjikan akan melakukan penarikan pasukan secara bertahap selama 14 bulan.

Setelah mencapai kesepakatan dengan Taliban, Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban dan komitmen untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan. Namun, kekerasan di Afghanistan tetap meningkat setelah perjanjian tersebut. Pemerintahan Biden juga memutuskan untuk melanjutkan kebijakan penarikan pasukan yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintahan Trump.

Kemenangan Taliban ini juga disebabkan oleh kurangnya stabilitas politik dan kelemahan pemerintah Afghanistan. Meskipun Amerika Serikat telah menghabiskan anggaran yang besar dan melatih pasukan keamanan Afghanistan selama dua dekade, tetapi upaya untuk membangun stabilitas dan kesadaran ideologis yang signifikan tidak tercapai. Pada akhirnya, penarikan pasukan Amerika Serikat dan kemenangan Taliban menunjukkan bahwa setelah 20 tahun perang, situasi di Afghanistan tetap kompleks dan sulit untuk diatasi. Pemerintah Afghanistan yang lemah, dukungan terbatas dari masyarakat, dan faktor-faktor lainnya juga berkontribusi pada keberhasilan Taliban dalam merebut kembali kekuasaan di negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Anugerah, B., & Purba, J. (2021). Afghanistan's Political and Security Conditions under Taliban's Regime and Its Significances to Global Geopolitics. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1).
- Ashghor, A. (2021). Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS (Taliban in Afghanistan: Overview of its Ideology, Movement and Alliance with ISIS). *Jurnal Keamanan Nasional*, VII(1).
- Asmara, C. (2021, January 23). *Begini Kebijakan Presiden Baru AS Joe Biden Soal Taliban*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210123171649-4-218265/begini-kebijakan-presiden-baru-as-joe-biden-soal-taliban>
- Aswar, H. (2021). Mengapa Taliban Menang Melawan AS? *Al-Wa'ie*, 9–12.
- Azizi, W. (2021, October 13). *How Corruption Played a Role in the Demise of the Afghan Government*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/10/how-corruption-played-a-role-in-the-demise-of-the-afghan-government/>
- Bahar, H. M. (2020). Social media and disinformation in war propaganda: how Afghan government and the Taliban use Twitter. *Media Asia*, 47(1–2), 34–46. <https://doi.org/10.1080/01296612.2020.1822634>
- Baldwin, J. E. (2021, August 20). *Why do many Afghans support the Taliban's extreme version of sharia law?* The Telegraph. <https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/do-many-afghans-support-talibans-extreme-version-sharia-law/>

- BBC. (2021, August 16). *Siapaakah Taliban? Sejarah kelompok yang kini menguasai kembali Afghanistan.*
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920>
- BBC News. (2021, August 17). *Afghanistan: Berapa biaya yang sudah dihabiskan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam perang melawan Taliban?*
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58241990>
- Beale, J. (2021, August 13). *Taliban: Bagaimana kelompok ini bisa merebut wilayah-wilayah di Afghanistan begitu cepat?* BBC News.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58143494>
- Bodetti, A. (2016, September 8). *The Taliban's Latest Battlefield: Social Media – The Diplomat.* The Diplomat.
<https://thediplomat.com/2016/09/the-talibans-latest-battlefield-social-media/>
- CNBC Indonesia. (2021, August 16). *Taliban Menang di Afghanistan, Kabul Resmi Dikuasai.* CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210816063206-4-268604/taliban-menang-di-afghanistan-kabul-resmi-dikuasai>
- CNN Indonesia. (2019a, September 8). *Trump Batalkan Pertemuan Rahasia dengan Pemimpin Taliban.* CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190908085733-134-428483/trump-batalkan-pertemuan-rahasia-dengan-pemimpin-taliban>
- CNN Indonesia. (2019b, September 10). *Negosiasi Damai Buntu, AS Sebut Bakal Gencar Serang Taliban.* CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190910111713-113-429018/negosiasi-damai-buntu-as-sebut-bakal-gencar-serang-taliban>

- CNN Indonesia. (2021, August 20). *Mengintip Kekuatan Militer dan Sumber Dana Taliban*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210818155019-120-681980/mengintip-kekuatan-militer-dan-sumber-dana-taliban>
- Dawi, A. (2022, July 28). *Are the Taliban Losing Their Digital Clout?* VOA.
<https://www.voanews.com/a/are-taliban-losing-their-digital-clout/6676585.html>
- Detik News. (2021a, August 13). *Bagaimana Taliban Bisa Merebut Kota-kota Afghanistan Begitu Cepat?* <https://news.detik.com/bbc-world/d-5681329/bagaimana-taliban-bisa-merebut-kota-kota-afghanistan-begitu-cepat>
- Detik News. (2021b, September 8). *Taliban Dulu Larang Internet, Kini Aktif Manfaatkan Media Sosial*. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5714403/taliban-dulu-larang-internet-kini-aktif-manfaatkan-media-sosial>
- Drissel, D. (2014). Reframing the Taliban insurgency in Afghanistan: New communication and mobilization strategies for the twitter generation. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 7(2), 97–128.
<https://doi.org/10.1080/19434472.2014.986496>
- DW. (2021, September 1). *Presiden AS Joe Biden Nyatakan Perang Afganistan “Berakhir.”* DW. <https://www.dw.com/id/joe-biden-nyatakan-perang-afganistan-berakhir/a-59046660>
- Haryanto, A. (2021, August 19). *Di Balik Kemenangan Taliban*. Detik News.
<https://news.detik.com/kolom/d-5687981/di-balik-kemenangan-taliban>

Jackson, A., & Weigand, F. (2019). *"The Taliban are no longer a shadowy insurgency; they are now a full-fledged parallel political order The Taliban's War for Legitimacy in Afghanistan."*

Katawazai, A. S. (2016, September 30). *Does More Aid Mean More Corruption in Afghanistan?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2016/10/does-more-aid-mean-more-corruption-in-afghanistan/>

Khuru'in, I. (2017). Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan. *Transformasi Global*, 3(1).

Kompas.com. (2020, March 1). *Perjanjian Damai AS-Taliban, Ini 4 Poin yang Perlu Anda Ketahui.* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/01/095330770/perjanjian-damai-as-taliban-ini-4-poin-yang-perlu-anda-ketahui?page=all>

Machmudi, Y., Noor, F., Ghafur, F., Fadilah, F., Nur, Y., Ascha, C., Hamdani, I., Mubarak, F., Wiharso, A., & Majiid, F. (2021). *Era Baru Afghanistan: Invasi Barat hingga Kemenangan Taliban* (Y. Machmudi, Ed.). Gema Insani.

Sahrasad, H., Chaidar, A., Bayhaki, I., Tabrani, D., Asrori Mulky, M., & Ridwan, M. (2021). Taliban in Afghanistan, Present and Future: In Search of an Inclusive, Peaceful, Welfare and Sovereign Nation State? *Budapest International Research and Critics Institute - Journal*, 4(4), 8898–8908. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2874>

Setiaji, H. (2021, August 18). *Kebangkitan Taliban dan Ancaman Ekonomi Afghanistan.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210818022356-4-269154/kebangkitan-taliban-dan-ancaman-ekonomi-afghanistan/2>

- Simpson, J. (2021, August 17). *Akanakah Taliban membawa Afghanistan ke masa lalu?* BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58227537>
- Sorongan, T. P. (2021, December 31). *AS Minggat, Taliban Berkuasa Penuh di Afghanistan.* CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230144426-4-303304/as-minggat-taliban-berkuasa-penuh-di-afghanistan>
- Statista.com. (2022, November 2). *Afghanistan - Growth of The Real Gross Domestic Product from 2010 to 2020.* <https://www.statista.com/statistics/262059/growth-of-the-real-gross-domestic-product-in-afghanistan/>
- Sullivan, C. J. (2021). White Flags: On The Return of The Afghan Taliban and The Fate of Afghanistan. *Asian Affairs*, 52(2), 273–287. <https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1882792>
- Tempo.co. (2019, January 27). *Taliban dan Amerika Finalisasi Draf Perjanjian Damai, Apa Isinya?* Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1169191/taliban-dan-amerika-finalisasi-draf-perjanjian-damai-apa-isinya>
- Tempo.co. (2021, August 18). *Ini Faktor Kenapa Taliban Bisa Kuasai Afganistan Nyaris Tanpa Perlawanan.* https://dunia.tempo.co/read/1495729/ini-faktor-kenapa-taliban-bisa-kuasai-afganistan-nyaris-tanpa-perlawanan?page_num=1
- Timberg, C., & Lima, C. (2021, August 18). *Afghanistan Taliban long have used Twitter, WhatsApp as propaganda, governance tools*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/technology/2021/08/18/taliban-social-media-success/>
- Transparency. (2020). *2020 Corruption Perceptions Index.* <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/afg>

- U.S Embassy in Qatar. (2020, February 29). *Agreement for Bringing Peace to Afghanistan*. https://qa.usembassy.gov/agreement-for-bringing-peace-to-afghanistan/?_ga=2.230629528.506425306.1664512487-1114429750.1664512487
- VOA. (2022, February 16). *Enam Bulan Taliban Berkuasa: Afghanistan Lebih Aman, tapi Lebih Miskin*. <https://www.voaindonesia.com/a/enam-bulan-taliban-berkuasa-afghanistan-lebih-aman-tapi-lebih-miskin/6443795.html>
- Weigand, F., & Cox, M. (2022). Why Did the 'Taliban Win (Again) in Afghanistan? *LSE Public Policy Review*, 2(3). <https://doi.org/10.31389/lseppr.54>
- Yousaf, F., & Jabarkhail, M. (2021). US withdrawal and the Taliban regime in Afghanistan: Future Policy Directions. *Policy Brief*, 5.